



Bab 2

Perencanaan Kinerja

A. VISI DAN MISI JANGKA PANJANG

Visi Jangka Panjang

isi pembangunan Kabupaten Bintan yang akan dicapai dalam dua puluh tahun mendatang (RPJP 2005-2020) adalah :

“BINTAN GEMILANG 2025”

***GERAKAN MELANGKAH MAJU DI BIDANG KELAUTAN, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN***

Penjabaran pernyataan Visi di atas adalah sebagai berikut :

- a) **Gemilang 2025** Memiliki arti “*Gerakan Melangkah Maju*”, gerakan yang dimaksud merupakan gerakan pembangunan yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk lebih maju yang melibatkan secara aktif seluruh pihak di Kabupaten Bintan dengan jangka waktu target capaian sampai tahun 2025.
- b) **Kelautan** Segala hal yang berkaitan dengan wilayah laut dan pantai, dengan mengoptimalkan seluruh kegiatan yang terkait dengan industri maritim, dimulai dari perikanan, *marine industries*, pelabuhan dan transportasi laut, mengingat kelautan sebagai core daerah, dengan luasan kabupaten Bintan 98,5% terdiri dari wilayah laut;
- c) **Pariwisata** : Segala hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata atau perjalanan untuk rekreasi, dalam skala industri dan kerakyatan dengan berfokus pad *ekowisata*;

- d) **Kebudayaan** : Merupakan kegiatan melestarikan dan memajukan seluruh hasil kegiatan dan penciptaan akal budi masyarakat seperti kesenian, dan adat istiadat dengan bersandar pada *Budaya Melayu*.

Tujuan akhir dari pencaanangan visi daerah tersebut adalah mewujudkan masyarakat **Bintan Yang Sejahtera**. Sejahtera dalam hal ini memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana **Sejahtera Lahir** diartikan terpenuhi segala kebutuhan lahiriah dan kehidupan ekonomi masyarakat, terpenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan **Sejahtera Batin** diartikan terpenuhi kebutuhan rohaniah masyarakat dengan berlandaskan kehidupan beragama dan budaya. Dari sisi pembangunan untuk mencapai masyarakat sejahtera, perlu pengembangan kegiatan ekonomi sesuai potensi dan keunggulan kabupaten Bintan, yaitu sektor kelautan dan pariwisata sebagai **core** dan sekaligus sebagai **driver activity**. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan mampu membawa dampak kemajuan daerah yang berkelanjutan, mampu tumbuh dan berkembang yang modern tetapi tetap peduli terhadap keberlanjutan sumber daya unggulan daerah dan pelestarian lingkungan.

Misi Jangka Panjang

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal;
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan;
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif;
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogyanya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bintan pada tahun 2013 berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015, yang merupakan pedoman operasional pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

1. VISI

Langkah awal dalam *strategy formulation* sebagai tahapan dalam perencanaan strategis adalah penetapan visi. Visi merupakan gambaran tentang masa depan (Future) yang realistis atas cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan motivatif yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu

Untuk mampu menjadi gambaran yang ingin diwujudkan suatu organisasi, pernyataan visi perlu diekspresikan dengan baik agar mampu menjadi tema yang mempersatukan semua unit dalam organisasi, menjadi media komunikasi dan motivasi semua pihak, serta sebagai sumber kreativitas dan inovasi organisasi. Atas dasar pengertian sebagai mana tersebut di atas, maka untuk tahun 2010 -2015 visi pemerintah Kabupaten Bintan adalah

**“ MENUJU BINTAN YANG MAJU, SEJAHTERA
DAN BERBUDAYA ”**

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi pemerintah Kabupaten Bintan adalah :

- **Bintan Yang Maju** adalah bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan beserta segenap potensinya secara berkelanjutan, namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan strategis
- **Sejahtera** adalah menunjukkan kondisi kemakmuran masyarakat Bintan yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) dan spritualnya.
- **Berbudaya** adalah perwujudan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya yang harus dijaga kelestariaannya sebagai pedoman pengembangan masyarakat. Perwujudan masyarakat yang memiliki sifat dan sikap yang terpuji dalam kehidupan sosial ekonomi, memiliki moral yang tinggi serta menjunjung norma-norma agama dan norma-norma adat yang berlaku.

2. MISI

Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. Misi adalah pernyataan mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dimasa datang, hal tersebut mengandung arti bahwa pernyataan misi memperlihatkan tugas utama yang harus dilakukan / diemban organisasi dalam mencapai tujuan organisasi untuk kurun waktu tertentu. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi, karena misi mewakili alasan dasar untuk berdirinya organisasi, apa yang ingin dicapai organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. Pernyataan misi mengandung pernyataan yang mencerminkan pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan pemerintah kabupaten Bintan untuk lebih eksis dan dapat mengikuti efek global otonomi daerah

Sejalan dengan hal tersebut, maka misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan,

dalam periode 2010-2015 diarahkan untuk mewujudkan Bintang yang lebih maju, Sejahtera dan berbudaya. Usaha-usaha perwujudan Visi kabupaten Bintang akan dijabarkan dalam misi pembangunan Bintang tahun 2010-2015 sebagai berikut :

1. Melanjutkan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berdaya saing, berbudaya serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan pembangunan perekonomian daerah yang berbasis pada pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Melanjutkan pengembangan potensi pariwisata dan agribisnis.
4. Melanjutkan upaya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menjunjung perkembangan diseluruh wilayah Kabupaten Bintang.
6. Melanjutkan upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal dan pengarusutamaan gender.
7. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (sustainable Development).

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan , Pemerintah Kabupaten Bintang menetapkan tiga puluh satu (31) tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Daerah dalam jangka waktu sampai tahun 2014, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat Bintang;
- 2) Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat Bintang;

- 3) Peningkatan kualitas sistem ketenagakerjaan ;
- 4) Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Bintan;
- 5) Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Bintan.
- 6) Pembentukan iklim yang kondusif bagi penanaman modal untuk kegiatan pembangunan di wilayah kabupaten Bintan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan manusia serta pola tata ruang daerah dan mendorong perkembangannya agar lebih efisien dan mampu bersaing;
- 7) Pengembangan kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal, adil dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana penunjang minopolitan.
- 8) Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah sektor kelautan dan perikanan.
- 9) Pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan sarana dan prasarana, promosi, pelayanan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 10) Pemanfaatan potensi alam yang ada disertai dengan pemberdayaan pengelolaannya guna pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan kesejahteraan.
- 11) Peningkatan kualitas aparaturnya pengawasan , pembinaan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah dalam usaha pemanfaatan , pengelolaan potensi wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 12) Pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di kecamatan;
- 13) Peningkatan fungsi dan peran lembaga perwakilan rakyat daerah;
- 14) Perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sumber daya yang ada dan kebutuhan penduduk serta

memperhatikan mitigasi bencana;

- 15) Peningkatan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana;
- 16) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 17) Peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah;
- 18) Peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai demokrasi;
- 19) Peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Bintan;
- 20) Peningkatan kualitas arsip dan perpustakaan daerah ;
- 21) Peningkatan keandalan sistem/jaringan infrastruktur pekerjaan umum dan pemukiman Kabupaten Bintan;
- 22) Pengembangan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi sumberdaya alam dengan optimal;
- 23) Pengembanagan dan pemberdayaan Masyarakat kabupaten Bintan;
- 24) Peningkatan peran serta perempuan dalam Pembangunan Daerah;
- 25) Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- 26) Penyusunan dan penetapan struktur, pemanfaatan dan pengelolaan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan sebagai pedoman pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang multisektoral dan terpadu;
- 27) Penyediaan energi listrik bagi masyarakat Kabupaten Bintan;
- 28) Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bintan;
- 29) Pembentukan Kabupaten Bintan Daerah yang bersih , hijau dan asri;
- 30) Peningkatan kelestarian sumber daya hutan di kabupaten Bintan;
- 31) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

4.Sasaran

1. Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama
2. Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan
3. Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%
4. Terpenuhinya standar/ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah
6. Terlindungnya peninggalan sejarah dan warisan budaya melalui peraturan daerah
7. Terpenuhinya pelayanan kesehatan sesuai standar
8. Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79,15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun
9. Meningkatnya unit usaha industri kecil dan menengah (IKM) sebesar 150%
10. Terbentuknya kawasan minapolitan di 3 lokasi yang terletak dikecamatan Bintang Pesisir, Kecamatan Mantang dan Kecamatan Bintang Timur
11. Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%
12. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%
13. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114%
14. Meningkatnya rata-rata pendapatan petani dari Rp1,35 juta menjadi Rp2,17 juta
15. Meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan regulasi yang berlaku
16. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur dari 40% menjadi 80%
17. Meningkatnya efektifitas pengelolaan administrasi kepegawaian daerah dari 76,66% menjadi 86,66%
18. Meningkatnya kinerja aparatur dari 40% menjadi 80%
19. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah yang ditandai dengan opini LAKIP daerah dari C menjadi A

20. Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%
21. Meningkatnya kinerja pemerintah dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku
22. Meningkatnya pembinaan masyarakat dikecamatan
23. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan kecamatan dari 90% menjadi 100%
24. Meningkatnya produk legislasi daerah yang disahkan dari 63,64% menjadi 100%
25. Meningkatnya kesesuaian muatan perencanaan daerah dengan implementasinya dari 70% menjadi 90%
26. Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana
27. Membaiknya opini laporan keuangan daerah dari WDP menjadi WTP
28. Meningkatnya penerimaan daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711,25 miliar
29. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dari 49,40% menjadi 60%
30. Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105
31. Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat
32. Meningkatnya kapasitas pelayanan aparatur sesuai standar
33. Menigkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, dan drainase
34. Meningkatnya rumah tangga yang terlayani kebutuhan listrik dari 60,38% menjadi 65%
35. Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standar
36. Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%
37. Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%
38. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari 10% menjadi 11,2%
39. Meningkatnya indeks kesetaraan gender dari 24,5 menjadi 30,1

40. Menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49%
41. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan Kabupaten Bintan
42. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%
43. Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33% menjadi 88%
44. Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2
45. Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha
46. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan /kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten 2010-2015. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2010-2015 yang memiliki fokus pada prospektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal business proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bintan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2010-2015 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Bintan nomor 47 Tahun 2010 yang direvisi melalui Peraturan Bupati No 31 Tahun 2014.

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2010-2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama	Persentase kerukunan antar umat beragama
Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan	Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan Kematian
	Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan
Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%	Tingkat Pengangguran Terbuka
	Persentase pencari kerja yang ditempatkan
	Rasio penduduk yang bekerja
Terpenuhinya standar/ ketentuan nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Indeks Pendidikan
	Angka rata-rata lama sekolah (RLS)
	Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/paket A
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B
	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A
	Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTS/paket B
	Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/paket C
	Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Angka Melek Huruf (AMH)
	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Terpenuhi pelayanan kesehatan sesuai standard	Angka indeks kesehatan
	Angka usia harapan hidup
	Angka kelangsungan Hidup bayi
	Persentase balita gizi buruk
	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan
	Cakupan kunjungan bayi
	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani
	Cakupan pelayanan ibu nifas
	CAkupan kunjungan Ibu hamil K4
	Cakupan Pelayanan Anak balita (minimal 8 kali)
	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79, 15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun	Persentase koperasi aktif
	Persentase UMKM Aktif
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita nelayan
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
	Jumlah Kunjungan Wisatawan
	Lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara
	Pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114%	Persentase kontribusi pertanian terhadap PDRB
Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%	Rasio penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah
	Persentase Kepemilikan KTP
	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
	Rasio Bayi berakte kelahiran per 100 bayi lahir
	Rasio Pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah
	Kepemilikan akta kelahiran penduduk
Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
	Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani.
Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711, 25 miliar	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah
Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105	Angka kriminalitas yang tertangani
	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Bintan
Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun
	Pengelolaan arsip secara baku
	Peningkatan SDM Pengelola kearsipan
Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, drainase	Persentase tingkat kemantapan jalan (Persentase jalan dalam kondisi baik /tidak berlubang/rusak)
Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standard	Rasio izin trayek per 1000 penduduk

Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sajahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49%	Rata-rata jumlah anak perkeluarga
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal
Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33 menjadi 88%	Persentase penanganan sampah
Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2	Persentase Luas ruang terbuka hijau yang dikelola
Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha	Persentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat
Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Reklamasi lahan pasca tambang
	Perusahaan pertambangan yang diaudit

Dengan adanya penetapan Indikator kinerja Kabupaten Bintan di tetapkan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bintan Tahun 2014 sebagai berikut :

Penetapan Kinerja dipergunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi . Dokumen Penetapan Kinerja /perjajniaan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Tabel Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KNERJA	TARGET
1	Meningkatnya toleransi antar umat beragama yang ditandai dengan tidak adanya kasus perselisihan antar umat beragama	Persentase kerukunan antar umat beragama	100%
2.	Terpenuhinya standar aturan ketenaga kerjaan	Persentase kecelakaan kerja yang menyebabkan luka berat dan Kematian	< 1
		Persentase kasus perselisihan pengusaha pekerja yang terselesaikan	90,00%
3.	Menurunnya angka pengangguran terbuka dari 9,94% menjadi 8,00%	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,50%
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	56,62%
		Rasio penduduk yang bekerja	0,95%
4.	Terpenuhinya standar/ ketentuan	Indeks Pendidikan	83,21

	nasional pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Angka rata-rata lama sekolah (RLS	8,22
		Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/paket A	106,50%
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTS/paket B	93,50%
		Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/paket A	93,75%
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTS/paket B	67,30%
		Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA/paket C	75,63
		Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/paket C	60,00
		Angka Melek Huruf (AMH)	99,30
5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian nilai seni dan budaya daerah	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6 kali
6.	Terpenuhi pelayanan kesehatan sesuai standard	Angka indeks kesehatan	75,10
		Angka usia harapan hidup	70,40
		Angka kelangsungan Hidup bayi	99,55%
		Persentase balita gizi buruk	< 1
		Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100
		Cakupan kunjungan bayi	114
		Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	80%
		Cakupan pelayanan ibu nifas	90,00
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	100
		Cakupan Pelayanan Anak balita (minimal 8 kali)	90,00%
		Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	80,00
7.	Meningkatnya persentase koperasi aktif dari 79, 15% menjadi 82,80% serta pertumbuhan rata-rata UMKM sebesar 3,77% pertahun	Persentase koperasi aktif	87,38%
		Persentase UMKM Aktif	100%
8.	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan dalam PDRB sebesar 8%	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita nelayan	3,97 juta
9.	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB dari 20,19% menjadi 25,00%	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	24,00
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	580.000
		Lama tinggal wisatawan (hari) mancanegara dan nusantara	3 hari
		Pengeluaran wisatawan (harian) mancanegara (USD) dan nusantara	USD900/Rp 4 jt
10.	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dari 7.21% menjadi 7,70% dan nilai tukar petani dari 105% menjadi 114%	Persentase kontribusi pertanian terhadap PDRB	7,60 %
11.	Meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil dari 64,40% menjadi 85%	Rasio Penduduk ber KTP per 1000 penduduk telah menikah	700 pasang
		Persentase Kepemilikan KTP	96%
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah

		Rasio bayi berakte kelahiran per 100 bayi lahir	65 orang
		Rasio pasangan berakte nikah per 1000 pasangan penduduk menikah	5
		Kepemilikan akta kelahiran penduduk	100%
12.	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan awal bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%
		Persentase kejadian bencana sosial yang ditangani.	100%
13.	Meningkatnya Penerimaan Daerah sebesar 60,4% yaitu dari 429,63 miliar menjadi 711, 25 miliar	Persentase peningkatan pendapatan asli daerah	174,78M
14	Menurunnya indeks kriminalitas dari 112 menjadi 105	Angka Kriminalitas yang tertangani	5,50%
		Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) di Kabupaten Bintan	149%
15.	Meningkatnya persentase kearsipan daerah dari 5% menjadi 80% dan berkembangnya minat baca masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	17.600 orang
		Pengelolaan Arsip secara baku	80%
		Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3
16.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan, jembatan, drainase	Persentase tingkat kemantapan jalan (Persentase jalan dalam kondisi baik /tidak berlubang/rusak)	95%
17.	Tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memenuhi standard	Rasio izin trayek per 1000 penduduk	65%
18.	Menurunnya persentase penduduk miskin dari 11% menjadi 8%	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	94,50%
19.	Menurunnya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial dari 6,98% menjadi 6,21%	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	34%
20	Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan sajahtera 1 dari 23,64% menjadi 22,49%	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	1,45
21.	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup dari 51,65% menjadi 59,79%	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100%
22	Meningkatnya persentase sampah yang ditangani dari 83,33 menjadi 88%	Persentase penanganan sampah	87,00%
23.	Meningkatnya luas ruang terbuka hijau yang dikelola dari 1.500 M2 menjadi 17.226 M2	Persentase Luas ruang terbuka hijau yang dikelola	100,35%
24.	Menurunnya kerusakan hutan lindung dari 1658,8 Ha menjadi 9 Ha	Persentase rasio luas kawasan tertutup pepohonan yang dilakukan dengan program reboisasi atau hutan rakyat	73,5 %
25.	Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Reklamasi lahan pasca tambang	9000 ha
		Perusahaan pertambangan yang diaudit	15 Perusahaan